

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah diberikan wewenang oleh pemerintah pusat dengan ruang gerak secukupnya untuk mengelola daerahnya sendiri agar lebih dapat memaksimalkan potensi serta sumberdaya yang dimiliki, dan mampu bekerja sama serta profesional dalam merumuskan langkah-langkah yang strategis untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. (Ni Putu Eka Sulasmini 2014)

pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Dalam menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya. (Dian Dharmaningtyas 2016)

Menurut UU No. 32 tahun 2004 (pengganti UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pengertian dari Otonomi daerah adalah kewajiban daerah otonomi untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya, guna dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. (Erianawati 2014)

Salah satu organisasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD adalah perusahaan yang diatur dengan suatu peraturan daerah. yang aktivitasnya memenuhi kebutuhan masyarakat di mana modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Adapun tujuan dari BUMD itu sendiri adalah ikut serta dalam melaksanakan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya. BUMD dalam melaksanakan aktivitasnya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada daerah tersebut, dan berusaha meningkatkan pendapatan daerah yang bersangkutan. Suatu perusahaan (badan) dapat mencapai misi dan tujuan apabila kekuatan yang dimiliki perusahaan melebihi kekurangan yang dimiliki. Oleh karena itu dalam suatu perusahaan diperlukan pengendalian intrern yang efektif. (Julianti 2015)

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2008:79), pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, seperti keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku."Tujuan diberlakukannya Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 agar laporan keuangan dapat lebih *accountable* dan berkualitas.

Salah satu tindakan kecurangan akuntansi yaitu penyimpangan laporan keuangan. Pada kenyataannya tindakan penyimpangan pada laporan keuangan pada suatu perusahaan (badan) masih ditemukan. Hal ini mengakibatkan laporan keuangan yang menjadi sumber informasi tidak relevan dan tidak dapat diandalkan. Untuk dapat memecahkan permasalahan kecurangan akuntansi, perlu dirancang suatu sistem pengendalian internal atau *control intern* yang efektif. Oleh sebab itu, pihak manajemen perlu melaksanakan fungsi pengendalian yang baik dalam meminimalisir kecenderungan terjadinya kecurangan. Fungsi pengendalian bagi manajemen yang perlu mendapat perhatian yang serius adalah pengendalian kas. (Ana Sufiyanti 2007)

Kas merupakan aktiva/asset perusahaan yang paling likuid dan paling rentan terjadi penyelewengan, penipuan dan pencurian (Slamet sugiri, 2009:1). Kas adalah alat pertukaran/pembayaran. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi asset disebut sebagai kas yaitu :

- a. harus siap digunakan setiap saat untuk melakukan pembayaran
- b. harus bebas dari ikatan ikatan apapun yang membatasi penggunaanya untuk melunasi kewajiban. (Slamet Sugiri, 2009: 4).

Pengertian kas adalah cek yang diterima dari para pelanggan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau demand deposit, yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali (dengan

menggunakan cek atau bilyet). Setiap perusahaan memerlukan kas dalam menjalankan aktivitas usahanya baik sebagai alat tukar dalam memperoleh barang atau jasa maupun sebagai investasi dalam perusahaan tersebut.

Oleh sebab itu dalam suatu perusahaan harus memiliki pengendalian *intern* kas yang efektif, agar bisa Menjaga keamanan harta milik perusahaan, Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, Memajukan efisiensi operasi perusahaan., Membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu untuk dipatuhi.

Pada Perusahaan Daerah Air Minum Gorontalo (PDAM) terdapat permasalahan yang ditunjukkan yaitu pengendalian intern kas belum dilaksanakan dengan baik, masih perlu adanya perbaikan-perbaikan manajemen di bidang administrasi keuangan. Ditandai dengan belum adanya pemisahan tugas dalam penanganan fisik kas yang seharusnya dipisahkan antara petugas yang mencatat, menyimpan, dan mengesahkan penerimaan uang. Sama halnya dengan petugas yang menandatangani cek dan petugas yang mencatat pengeluaran uang kas. Agar bisa meminimalisir adanya penyelewengan. Seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Syafi'i (2015:58) kas merupakan aktiva perusahaan yang tidak produktif dan sangat rentan terhadap penyalahgunaan para karyawan. Oleh karena itu diperlukan suatu manajemen kas yang baik dengan diberlakukannya pemisahan fungsi

penanganan fisik kas agar tidak diberi akses pada pencatatan kas dan begitupun sebaliknya.

Perusahaan harus lebih selektif dalam memperhatikan pengendalian *intern* kasnya. Hal tersebut diperlukan agar pengendalian *intern* yang selama ini telah dijalankan oleh perusahaan dapat ditingkatkan sehingga menekan penyimpangan-penyimpangan yang masih sering terjadi, dimana pihak manajemen dituntut untuk dapat membuat perencanaan yang lebih baik lagi serta dapat mengendalikannya secara lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Kas Terhadap Kewajaran Pengelolaan Kas”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian penerimaan kas dan sistem pengendalian pengeluaran kas secara simultan terhadap kewajaran pengelolaan kas.
- 1.2.2 Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian penerimaan kas dan sistem pengendalian pengeluaran kas secara parsial terhadap kewajaran pengelolaan kas.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah

- 1.3.1 untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem pengendalian penerimaan kas dan sistem pengendalian pengeluaran kas secara simultan terhadap pengelolaan kewajaran kas.
- 1.3.2 Untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem pengendalian penerimaan kas dan sistem pengendalian pengeluaran kas secara parsial terhadap pengelolaan kewajaran kas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini untuk menambah pengetahuan peneliti sebagai perbandingan antara yang didapat di bangku perkuliahan dengan keadaan yang dilapangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan memberikan informasi atau masukan dalam hal pelaksanaan pengendalian intern kas.